

LAPORAN KINERJA BAPEMPERDA
BULAN JANUARI SAMPAI DENGAN MARET 2025

Disampaikan oleh:
PUDJO SUSENO, SE

Jumat, 21 Maret 2025

Yang terhormat Sdr. Ketua dan Wakil Ketua DPRD.

Yang saya hormati Sdr. rekan-rekan Anggota DPRD Kota Salatiga.

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Salam Sejahtera dan Selamat Pagi untuk kita semua.

Pertama tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas perkenanan-Nya hari ini kita dapat bertemu dalam keadaan sehat wal'afiat untuk menghadiri Rapat Paripurna hari ini.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Internal DPRD yang saya hormati,

Berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib, Bapemperda melaksanakan fungsi pembentukan Peraturan Daerah. Untuk itu, maka perlu kami sampaikan bahwa sesuai dengan Propemperda Tahun 2025 Rancangan Peraturan Daerah Kota Salatiga tercatat 20 Raperda yang masih berproses. Dari 20 Raperda tersebut, ada 10 Raperda inisiatif DPRD dan 10 Raperda Inisiatif Wali Kota. Adapun 10 Raperda Inisiatif DPRD tersebut terdiri atas 5 Raperda tahun 2025 dan 5 Raperda lainnya merupakan luncuran dari periode sebelumnya. Begitu pula dengan Raperda inisiatif Wali Kota terdiri atas 2 Raperda tahun 2025 dan 8 Raperda luncuran periode sebelumnya.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Internal DPRD yang saya hormati,

Berdasarkan laporan yang kami terima, proses Raperda kami sampaikan berdasarkan tahapan sebagai berikut:

1. Proses Harmonisasi Bapemperda terdapat 6 (enam) Raperda terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (telah dilakukan harmoniasi Bapemperda saat ini menunggu penyempurnaan dari Tim Penyusun);
 - b. Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan;
 - c. Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro;
 - d. Raperda tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - e. Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha; dan

- f. Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Sehat.
2. Proses Harmonisasi Kantor Wilayah Hukum Kementerian Hukum terdapat 1 (satu) Raperda yaitu Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan yang saat ini menunggu penyempurnaan dari Tim Penyusun.
3. Proses Pembahasan Pansus, terdapat 1 (satu) Raperda yaitu Raperda tentang Inovasi Daerah
4. Proses menunggu Fasilitasi Gubernur terdapat 8 (delapan) Raperda terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Ketahanan Pangan;
 - b. Raperda tentang Pencabutan Perda Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;
 - c. Raperda tentang Perlindungan Anak;
 - d. Raperda tentang Pemekaran Kelurahan Mangunsari dan Kelurahan Dukuh;
 - e. Raperda tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
 - f. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Salatiga;
 - g. Raperda tentang Penyelenggaraan Tertib Tuna Sosial; dan
 - h. Raperda tentang Jasa Konstruksi
5. Proses di eksekutif belum diserahkan ke DPRD terdapat 4 (empat) Raperda, terdiri atas:
 - a. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
 - b. Raperda tentang Perubahan Perda Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;
 - c. Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Tahun 2025-2055; dan
 - d. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.

Sehubungan dengan pencapaian tersebut, kami mengucapkan terima kasih atas pelaksanaan tugas rekan-rekan Pansus dalam proses pembentukan Raperda terkait.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Internal DPRD yang saya hormati, berkenaan dengan agenda Banmus bulan Maret 2025, pada hari ini kami laporkan kinerja Bapemperda bulan Januari 2025 sampai dengan bulan Maret 2025 sebagai berikut:

A. Kinerja bulan Januari 2025

1. Rapat Harmonisasi Bapemperda terhadap Raperda tentang Partisipasi Masyarakat dalam Pembangunan dan Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 10 Januari 2025;

2. Rapat Harmonisasi Bapemperda terhadap Raperda tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada tanggal 14 Januari 2025, 17 Januari 2025, dan 22 Januari 2025.

B. Kinerja bulan Februari 2025

1. Konsultasi Publik Naskah Akademik Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tanggal 7 Februari 2025;
2. Konsultasi Publik Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Sehat pada tanggal 7 Februari 2025;
3. Konsultasi Publik Naskah Akademik Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan pada tanggal 10 Februari 2025;
4. Konsultasi Publik Naskah Akademik Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha pada tanggal 10 Februari 2025;
5. Konsultasi Publik Naskah Akademik Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro pada tanggal 11 Februari 2025;
6. Konsultasi Publik Raperda tentang Penyelenggaraan Kesehatan pada tanggal 12 Februari 2025;
7. Konsultasi Publik Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro pada tanggal 14 Februari 2025;
8. Konsultasi Publik Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika pada tanggal 11 Februari 2025;
9. Konsultasi Publik Naskah Akademik Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha pada tanggal 12 Februari 2025;
10. Konsultasi Publik Raperda tentang Penyelenggaraan Kota Sehat pada tanggal 14 Februari 2025;
11. Kunjungan Kerja Bapemperda bersama Ketua DPRD ke Dinas Koperasi Kab Sleman dan Jogjatama Vishesha tanggal 24-27 Februari 2025 terkait Raperda tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Usaha Mikro, dan Raperda tentang Perusahaan Perseroan Daerah Aneka Usaha dengan hasil pendalaman materi sebagai berikut:
 - a. Perlu pendampingan usaha mikro mencakup pendampingan perizinan halal, NIB dan PIRT;
 - b. Pemkab Sleman membentuk Forum Komunikasi UMKM yang dibentuk mulai tingkat kelurahan sampai dengan kabupaten;
 - c. Dalam pengembangan UMKM dilakukan melalui aplikasi satu data UMKM;
 - d. Dilakukan pelayanan permodalan dengan sistem monitoring perkembangan UMKM;
 - e. Perlunya kreativitas bisnis dalam pengembangan PDAU;

- f. Perlu dukungan pemerintah daerah dalam bentuk kebijakan yang condong kepada PDAU dalam meningkatkan kinerjanya;

C. Kinerja bulan Maret 2025

Rapat Harmonisasi Bapemperda terhadap Raperda Penyelenggaraan Kesehatan pada tanggal 17 Maret 2025 secara langsung dan secara zoom meeting.

Bapak/Ibu dan hadirin peserta Rapat Paripurna Internal DPRD yang saya hormati,

Demikian laporan kinerja Bapemperda ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Salatiga, 21 Maret 2025

BAPEMPERDA DPRD

KOTA SALATIGA

KETUA,

PUDJO SUSENO, SE